

SILABUS

JUDUL MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA

NOMOR KODE/SKS : 00005207 / 2 SKS

SEMESTER : 2

DOSEN :

DESKRIPSI SINGKAT : Mata kuliah ini membahas mengenai landasan, tujuan dan konteks sejarah bangsa Indonesia. Mata kuliah ini menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan kekartawanan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama bidang politik di negara. Mata kuliah ini juga menjelaskan pancasila dalam konteks derivasinya dalam bidang ketatanegaraan Republik Indonesia serta Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mampu mengaplikasikannya dalam penerapan ipteks yang dikuasainya. Pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Pancasila selama 14 kali tatap muka.

STANDAR KOMPETENSI :

Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

NO	KOMPETENSI DASAR	MATERI PEMBELAJARAN	URAIAN MATERI PEMBELAJARAN	ES. WAKTU	MEDIA PEMBELAJARAN	PENDEKATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	DAFTAR KEPUSTAKAAN
1	Mahasiswa mengetahui dan memahami landasan dan tujuan matakuliah Pendidikan Pancasila.	Dasar-dasar yuridis tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan Pancasila serta kompetensi yang diharapkan dari kuliah	1. Landasan Historis, Kultural, Yuridis, dan Filosofis. 2. Tujuan Nasional dan tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)

		Pendidikan Pancasila.	3. Kompetensi yang diharapkan dari kuliah Pendidikan Pancasila.					
2	Mahasiswa mengetahui dan memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia	Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, kronologis sejarah perumusan Pancasila dasar filsafat negara, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologi sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah sebelum abad XX serta perjuangan nasional 2. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan perjuangan mempertahankan Kemerdekaan 3. Kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila dan UUD 1945 	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal : 	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)

3	Mahasiswa mengetahui dan memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia	Dinamika pelaksanaan UUD 1945.	1. Perkembangan pemikiran manusia dalam mensikapi fenomena alam	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)
4	Untuk mengerti, memahami, menghayati Pancasila sebagai sistem filsafat.	Dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai suatu kesatuan sistematis dan logis, pengetahuan sistem filsafat, perbandingan dengan sistem filsafat lainnya di dunia.	1. Pengertian sistem dan unsur-unsur sistem. 2. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang sistematis, hirarkhis, dan logis.	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)
5	Untuk mengerti, memahami, menghayati Pancasila sebagai sistem filsafat	Dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai satu kesatuan sistematis dan logis, pengetahuan sistem filsafat, perbandingan dengan sistem	1. Unsur-unsur Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. 2. Perbandingan filsafat Pancasila dengan sistem filsafat lainnya di dunia.	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)

		filsafat lainnya di dunia.						
6	Untuk mengerti, memahami,, menghayati Pancasila sebagai sistem filsafat.	Dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai satu kesatuan sistimatis dan logis, pengetahuan sistem filsafat, perbandingan debgan sistem filsafat lainnya di dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inti isi sila pertama. 2. Inti isi sila kedua 3. Inti isi sila ketiga 4. Inti isi sila keempat 5. Inti isi sila kelima 	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal : 	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)
7	Untuk memahami, dan menerapkan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan keuargaan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama bidang politik.	Etika, etika politik dan Pancasila sebagai sistem etika.	Pengertian etika sebagai salah satu cabang filsafat praktis. Berdasarkan teori-teori etika dikembangkan pengertian Pancasila sebagai sistem etika.	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal : 	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)
8	Untuk memahami dan menerapkan	Etika politik dan nilai-nilai etika yang	Pengertian etika politik, dan berdasarkan	2 x 45'	LCD, whiteboard,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur: 2. Bentuk 	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)

	nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan kekarya-an, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama bidang politik.	terkandung di dalamnya.	rincian nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila kemudian secara praktis diterapkan dalam kehidupan politik.		spidol	3. Dialog	soal: 3. Soal :	
9	Untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan kekarya-an, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama bidang politik.	Etika dalam kehidupan kekarya-an, kemasyarakatan, kenegaraan, dan memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan etika.	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memiliki kemampuan untuk menerapkan norma-norma etika yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan kekarya-an, kemasyarakatan, kenegaraan.	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)
10	Untuk memahami dan menghayati Pancasila	Pengertian dan makna ideologi bagi bangsa dan negara,	1. Pengertian ideologi secara umum makna ideologi bagi	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal:	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)

	sebagai ideologi bangsa dan negara.	membedakan macam ideologi, makna dan peranan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.	<p>suatu negara.</p> <p>2. Pengertian macam-macam ideologi (terbuka, tertutup, komprehensif, partikular).</p> <p>3. Peranan ideologi bagi bangsa dan negara.</p> <p>4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang memiliki ciri terbuka, komprehensif, reformatif dan dinamis.</p> <p>5. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekulerisme dan ideologi keagamaan.</p>				3. Soal :	
11	Mengerti,	Kedudukan	1. Kedudukan	2 x 45'	LCD,	1. Kuliah	1. Prosedu	(1),(2),(3),(4),(5)

	memahami, Pancasila dalam konteks deri vasinya dalam bidang ketatanegaraan Republik Indonesia.	Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia, makna isi Pembukaan UUD 1945, Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm dan kedudukannya dalam tertib hukum Indonesia.	Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. 2. -Menjelaskan isi Pembukaan UUD 1945, Pembukaan sebagai Staatsfundamentalnorm. 3. -Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945.		whiteboard, spidol	2. Mimbar 3. Dialog	r: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	,(6),(7),(8),(9),(10),(11)
12	Mengerti, memahami, Pancasila dalam konteks deri vasinya dalam bidang ketatanegaraan Republik Indonesia.	Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah dilakukan amendemen, realisasi hak-hak asasi manusia dalam negara Republik	1. Isi UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen 2002 tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. 2. Reformasi hukum tata negara Indonesia.	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11)

		Indonesia.	3. Hak Asasi Manusia					
13	Mengerti, memahami Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mampu mengaplikasikannya dalam penerapan ipteks yang dikuasainya.	Pengertian Paradigma, pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kehidupan antar umat beragama, dan IPTEKS.	1. Pengertian paradigma secara umum. 2. Pengertian Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, kehidupan antar umat beragama dan IPTEKS.	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)
14	Mengerti, memahami Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mampu mengaplikasikannya	Pengertian Pancasila sebagai paradigma reformasi, dan pengertian Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus	1. Pancasila sebagai paradigma reformasi 2. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus.	2 x 45'	LCD, whiteboard, spidol	1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog	1. Prosedur: 2. Bentuk soal: 3. Soal :	(1),(2),(3),(4),(5), (6),(7),(8),(9),(10),(11)

	dalam penerapan ipteks yang dikuasainya.							
--	------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

REFERENSI BUKU:

1. Universitas Gunadarma, Diktat Kuliah Pendidikan Pancasila, Edisi 2007
2. Drs. H. KAELAN, M.S. Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi Tahun 2000, Paradigma Yogyakarta.
3. Ditjen DIKTI Depdiknas, 2001, Kapita Selekta Pendidikan Pancasila, Bag.1, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
4. Budiardjo Miriam, 1981, Dasar-dasar ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
5. Darmodihardjo Dardji, 1996, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
6. Wibisono Koento, 1989, Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Makalah pada Lokakarya Dosen-dosen Pancasila PTN dan PTS se-Kopertis Wilayah V, Yogyakarta.
7. Sekneg RI, 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta.
8. Sinar Grafika, 2002, UUD 1945 Hasil Amandemen Agustus 2002, Jakarta.
9. Ditjen Dikti Depdiknas, 2001, Kapita Selekta Pendidikan Pancasila Bag.II, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
10. Mahfud, M.D. 1998, Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum, Makalah Diskusi Panel pada Pusat Studi Pancasila UGM.
11. Ketetapan-ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku.